

## PENGUATAN STRATEGI PENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PESERTA KB MODERN DI PROVINSI LAMPUNG

Wira Setio Andini<sup>1</sup>, Aila Karyus<sup>1</sup>, Abikusno Djamiluddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mitra Indonesia

[wirasetioandini@gmail.com](mailto:wirasetioandini@gmail.com)

### *Strengthening Society Participation in Improving Modern Family Planning Participant in the Lampung*

**Abstract:** The family planning program is an effort to regulate the birth of children, the ideal distance and age to give birth, to regulate pregnancy through promotion, protection and assistance in accordance with reproductive rights to create a quality family. The COVID-19 pandemic situation has resulted in a decrease in the number of family planning participants. The purpose of this observation is to observe the phenomenon of sluggish public participation in the family planning program and determine strategies so that family planning services can reach all prospective family planning participants. This type of research is qualitative, with data collection methods using in-depth interviews and focus group discussions with family planning managers at the provincial and district levels. Observations were carried out in May – June 2022. The results obtained were that community participation in the modern family planning program was sluggish because during the pandemic there were no mobile family planning services that involved a lot of mass media and services at health facilities were limited, services were provided by giving pills or condoms to couples of childbearing age who requires repeated family planning, but this method has a very high potential for discontinuation. Suggestions to the Lampung Province BKKBN are to encourage managers of intensive family planning programs to provide mobile family planning services and utilize digital promotional media to inform family planning services.

**Keywords:** Covid-19, Service, Family

**Abstrak:** Program KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Situasi pandemic covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah peserta KB. Tujuan pengamatan ini untuk mengamati fenomena lesunya partisipasi masyarakat dalam program KB dan menentukan strategi agar pelayanan KB dapat menjangkau semua calon peserta KB. Jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan focus group discussion dengan pengelola KB di tingkat provinsi maupun kabupaten. Pelaksanaan pengamatan pada Mei – Juni 2022. Hasil pengamatan diperoleh lesunya partisipasi masyarakat dalam program KB modern karena selama pandemic tidak ada pelayanan KB bergerak yang melibatkan banyak media massa dan pelayanan di fasilitas kesehatan terbatas, pelayanan diselenggarakan dengan memberikan pil atau kondom terhadap pasangan usia subur yang membutuhkan KB ulangan namun metode tersebut sangat tinggi potensi putus pakainya. Saran kepada BKKBN Provinsi Lampung agar mendorong pengelola program KB intensif memberikan pelayanan KB bergerak dan memanfaatkan media promosi digital untuk menginformasikan pelayanan KB.

**Kata kunci:** Covid-19, Pelayanan, keluarga

## PENDAHULUAN

Sasaran Program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan yang wanitanya berusia antara 15-49 tahun, karena kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan yang dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan secara bertahap menjadi peserta KB yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan fertilitasi. Tidak tercapainya target kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*) pada tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya prevalensi peserta Kontrasepsi modern/Modern Contraception Prevalence rate (mCPR) (Profil Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Berdasarkan data BKKBN tahun 2020, mCPR tahun 2019 sebesar 62% dan pada tahun 2020 turun menjadi 61,8 sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 66,8%. Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2019 sebagai bencana global memberikan dampak terhadap jumlah peserta KB, hal ini diakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat di semua sector termasuk Kesehatan, Pelayanan KB yang umumnya identik dengan melibatkan massa dalam dilakukan dengan metode pelayanan bergerak untuk mendekatkan akses ke calon akseptor ditiadakan selama masa pandemic. Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan pun tidak menjadi prioritas diselenggarakan, walaupun ada jumlah akseptor yang dilayani terbatas dan harus membuat janji terlebih dahulu dengan tenaga Kesehatan. Situasi ini membuat akses pelayanan KB sangat terbatas dan hamper tidak berjalan

selama pandemic (Profil Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

BKKBN berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan merubah metode KB para peserta KB yang tidak mendapat akses pelayanan KB dengan metode PIL, kondom namun kedua metode ini sangat potensial mengalami kegagalan bahkan bisa meningkatkan angka putus pakai sehingga alternatif ini kurang efektif. Untuk mencapai target tahun 2024 sebesar 68,24% maka dibutuhkan suatu strategi agar jumlah peserta KB meningkat perlahan sering dengan adaptasi kebiasaan baru era Pandemi Covid-19 (Profil Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Menurut penelitian Fane (2020), upaya untuk mempromosikan keluarga berencana dapat dilakukan melalui : a) Advokasi untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*), b) Dukungan sosial, dengan tujuan untuk mencari dukungan dari berbagai elemen (tokoh masyarakat) untuk menjembatani antara pelaksana program, c) Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment Community*) untuk melakukan promosi program KB, d) kemitraan.

Perwakilan BKKBN merupakan Lembaga non kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat terkait program keluarga berencana di daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka urusan kesehatan khususnya keluarga berencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian kedudukan BKKBN Lampung dengan Pemerintah daerah adalah sebagai mitra

kerja. Kemitraan dalam penyelenggaraan program KB juga dapat dijalin pada sector lainnya seperti dari unsur TNI, Organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia. Semakin baik jalinan kemitraan maka semakin efektif pula pola penggerakan atau pencarian calon akseptor (Shodiq, 2022)

Berdasarkan teori dasar yang dikembangkan oleh Lawrence Green (1991), kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavior causes). Sementara faktor perilaku (behavior causes) dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi (Predisposing Factors) yang meliputi umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan sikap, faktor pemungkin (Enabling Factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik dan jarak ke fasilitas kesehatan, dan faktor penguat (Reinforcing Factors) yang terwujud dalam dukungan yang diberikan oleh keluarga maupun tokoh masyarakat (Rachmawati, 2019)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan sasaran pengelola program KB di Tk.Provinsi dan Tk.Kab/kota sehingga masyarakat sebagai calon peserta KB mendapatkan pelayanan KB di tengah situasi adaptasi kebiasaan baru. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan data primer yang didapatkan dari wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap

pengelola program KB dan melakukan observasi terhadap data sekunder. Data primer dan data sekunder yang merupakan data kualitatif kemudian dilakukan analisis situasi dan dibuat rekomendasi dengan pendekatan siklus pemecahan masalah. Waktu Pelaksanaan kegiatan dari tanggal 20 Mei s.d 30 Juni 2022 (Sutanto Priyo Hastono, 2016)

## **HASIL PENELITIAN**

Informan pada kegiatan ini terdiri dari pengelola program KB di tingkat provinsi dan kabupaten kota, terdiri dari informan I (Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) , informan II (Sub Koordinator Bina Kesertaan KB Jalur pemerintah dan swasta), informan III (Sub Koordinator Data dan Informasi BKKBN Provinsi Lampung), informan IV (Kepala Bidang KBKR Dinas KB dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pesisir Barat), informan V (Penyuluh KB Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan informasi bahwa pelayanan KB selama masa pandemi Covid -19 memang menurun hal ini karena adanya himbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga pelayanan KB menjadi tidak prioritas untuk dilaksanakan, sebagaimana pernyataan Koordinator Bidang KBKR BKKBN Provinsi Lampung :

(Informan I)

*“...Peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat kontrasepsi*

disebut peserta KB aktif. Jumlah peserta KB aktif ini sangat berpengaruh dengan jumlah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ber-KB nya, artinya kalau jumlah peserta Aktif turun maka akan berpengaruh pada rendahnya capaian teget unmetneed...”

“...Penurunan frekuensi pelayanan bergerak menjadi makin ekstrim Ketika kita dihadapkan pada situasi pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020. Kondisi ini tentu sangat menjadi tantangan dalam keberlangsungan pelayanan KB karena kondisi ini dapat mempengaruhi prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, peningkatan angka putus pakai (drop out) dan peningkatan jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)...”

“...Selain meningkatkan jumlah faskes yang mendapat distribusi alokon sehingga semakin banyak faskes yang menyediakan pelayanan KB. Strategi lain yang dilakukan perwakilan BKKBN Provinsi Lampung adalah penyelenggaraan kegaitan pelayanan bergerak, maksudnya adalah BKKBN dan mitra kerja bekerjasama menyelenggarakan pelayanan KB dengan metode menjemput bola, sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Biasanya pelayanan ini dilaksanakan secara momentum seperti pelayanan KB gratis pada peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) provinsi Lampung,

HUT Kab.Kota, HUT mitra kerja seperti HUT IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Harus di akui, kondisi pelayanan KB bergerak ini sangat menurun frekuensinya, awalnya disebabkan karena dukungan pelayanan KB yang masih ada di BKKBN menghadapi tantangan refocusing anggaran, mengapa ini menjadi hambatan, karena pada pelayanan bergerak biaya jasa medis pelayanan KB tidak dapat dilakukan pengklaiman ke BPJS. Karena pelayanan bergerak ini berifat masal sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan proses pengklaiman. Oleh karena itu Perwakilan BKKBN menyediakan biaya pelayanan KB melalui alokasi APBN dalam bentuk BOKB...”

“...Pada tahun 2020 kita mengalami situasi Pandemi Covid-19, dimana segala aktivitas kemasyarakatan menjadi terbatas, termasuk pelayanan KB. Di fasilitas kesehatanpun menjadi terhambat. Kondisi ini memberi rasa khawatir karena bila yang ingin KB ulang tidak terpenuhi bisa terjadi putus pakai. Dan yang ingin menggunakan KB tapi tidak bisa dilayani maka makin meningkatkan angka unmetnet. Kedua kondisi ini menjadi tantangan dalam menurunkan unmetnet sehingga capaian terget unmetneed tahun 2021 masih jauh dari target. Semakin banyak unmetneed tentu membuat jumlah peserta KB menurun, dan dampaknya pada tahun 2021 mCPR

*Provinsi Lampung turun dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021...”*

BKKBN tidak dapat secara langsung menyelenggarakan pelayanan KB di Kab/Kota, Untuk itu perlu menjalin kemitraan dengan OPD KB Kab/Kota. Sebagai mitra BKKBN yang bertanggung jawab mengelola program KB di wilayah Kab/Kota

(Informan II)

*“...Penyelenggaraan Pelayanan KB merupakan hasil Kerjasama antara perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan OPD KB di semua Kab/Kota Provinsi Lampung dan melalui OPD KB inilah dilakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan di Kab/Kota, organisasi profesi yang ada di Kab/Kota, mitra potensial seperti PKK dan TNI, sehingga pelayanan dapat secara utuh terselenggara*

*Sebagaimana alur proses bisnisnya , tugas BKKBN provinsi adalah menggerakkan peserta KB melalui kinerja tenaga penyuluh yang berkedudukan di wilayah kab/kota (bukan wilayah BKKBN) dan menyediakan alat dan obat kontrasepsi. Dan adanya dukungan operasional pelayanan dalam bentuk BOKB. Sehingga dengan terdistribusinya alat kontrasepsi, OPD KB kab/kota melanjutkan koordinasidengan mitra-mitranya untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan melalui tenaga dokter/ bidan dan penyediaan tempat pelayanan*

*puskesmas, pustu, posyandu, praktek mandiri bidan, klinik swasta, dll...”*

Bentuk nyata dukungan BKKBN untuk mengelola program KB agar berjalan dengan baik seluruh wilayah Kab/Kota adalah dengan mendistribusikan alat kontrasepsi secara merata sesuai kebutuhan calon akseptor di Kab/Kota, bahkan tahun 2022 BKKBN menargetkan sebanyak 509 Fasilitas Kesehatan mendapatkan distribusi alat kontrasepsi, dikeluarkanya dua regulasi yaitu PERBAN Nomor.9 tahun 2019 tentang tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan PERBAN Nomor.1 tahun 2022 tentang perluasan akses pelayanan keluarga berencana adalah bentuk komitmen BKKBN dalam mendorong OPD KB mengelola program KB di Tk.Kab/Kota

Pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian bertepatan dengan momentum pelayanan KB di kegiatan TMMD 113 tahun 2022 yang puncak acaranya belokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil wawancara dengan pengelola program KB di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

*“...TMMD merupakan agenda tahunan, yang lokusnya adalah daerah terpencil, seperti yang kita kunjungi saat ini. Akses air bersih tidak minim, pengetahuan tentang KB nya masih belum baik, masih banyak yang belum mau ikut KB, padahal lokasi seperti*

*ini idealnya menggunakan MKJP, jadi tiap bulan ga harus mikir KB nya gimana...”*

*“... Sejak covid-19 menyebar puskes ga mau kl pelayanan KB, jadi kita kadang bikin pelayanan di tempat bidan itu juga sehari bidanya ga mau banyak-banyak, memang paling efektif pelayanan yang massal...”*

*“... kebanyakan kerjanya di ladang, rumahnya di gunung, untuk dating ke lokasi pelayanan harus dijemput, itupun blm mau pake implant, masi mau pil atau suntik..”*

## PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kondisi yang menyebabkan menurunnya capaian mCPR tahun 2021 yaitu: a) Menurunnya Frekuensi pelayanan KB bergerak /metode jemput bola, b) pelayanan KB massal belum tertalu gencar akibat adaptasi situasi pandemic covid-19 tahun sebelumnya, c) Tidak ada regenerasi kader dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promosi program KB (Wardani et al., 2019)

Sebagaimana dijelaskan dalam teori HL Blum dalam Irwan (2017) bahwa derajat Kesehatan seseorang ditentukan oleh 4 faktor yaitu, genetic, perilaku, fasilitas Kesehatan dan lingkungan (sosial budaya, Pendidikan, dll) dan dalam teori Lawrence Green (1991) perilaku seseorang dipengaruhi oleh *predisposisi*,

*“...Biasanya rame kalo pelayanan sebelum pandemic, kan kl banyak yg make implant ikutan mau, atau banyak yg mau suntik tetangganya juga ikutan, tapi sejak covid banyak yang takut akhirnya ya lepas pake KB nya...”*

Penguatan akses informasi edukasi ber-KB memang belum merata, hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah penyuluh KB di wilayah terpencil, kondisi pandemic membuat kegiatan yang melibatkan media massa pun ditindakan.

*enabling factor*, dan *reinforcing factor* (Rachmawati, 2019)

Ketika seseorang sudah menegtahui tentang KB maka perilaku menjadi peserta KB tidak serta merta terbentuk, perlu dukungan factor seperti tersedianya aloat kontrasepsi, tersedianya tenaga pelayanan KB, tersedianya tempat pelayanan KB. Apabila alat kontrasepsi telah didistribusikan ke fasilitas Kesehatan, tenaga Kesehatan siap melayani, akseptor sudah bersedia ikut tanpa peran pengelola program KB diKab/kota sebagai penyelenggara maka perilaku ikut menjadi peserta KB juga tidak terbentuk (Irwan, 2017)

Untuk itu perlu dilakukan penguatan startegi advokasi yang mendorong OPD KB di Kab/Kota menyelenggarakan pelayanan KB yang mendekatkan akses ke masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan KB bergerak dengan memanfaatkan momentum, meskipun jumlah

peserta harus diatur waktu kedatangannya karena menyesuaikan pada kebiasaan baru di era pandemic Covid-19. Kalau tidak serakarang dimulai maka kapan lagi, semakin ditunda tentu dampak menurunnya jumlah peserta KB makin besar, seperti meningkatnya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatnya kehamilan dengan resiko tinggi, dan kualitas Kesehatan reprduksi ibu menurun (Anitasari et al., 2021)

Berdasarkan hal tersebut dalam kegiatan penelitian ini direkomendasikan beberapa strategi agar jumlah peserta KB meningkat pada pelayanan TMMD 113 Tahun 2022 di Kab. Pesisir Barat. Adapun rekomendasi yang diberikan ke BKKBN Provinsi Lampung adalah:

- a. Sebagai mitra kerja maka BKKBN aprovinsi lampung mefasilitasi kebutuhan alat kontrasepsi yang dibutuhkan Kabupaten Pesisir Barat
- b. BKKBN provinsi memberikan target capaian jumlah akseptor pada pelayanan KB TMMD 113 dan meminta bantuan jajaran OPD KB Kab. Pesisir Barat untuk berkomitmen meningkatkan hasil capaian Pelayanan KB pada momentum ini
- c. Perwakilan BKBBN mendukung operasional pelayanan dalam bentuk Bantuan Operasional KB pada menu Operasional Penggerakan Pelayanan KB TA 2022 (sesuai perban nomor 13 Tahun 2022) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- d. Menghimbau OPD KB Kabupaten Pesisir Barat menyelenggarakan

pelayanan KB TMMD 113 dengan mendekatkan akses pelayanan ke calon akseptor/ dengan masyarakat, di seluruh wilayah Kab. Pesisir Barat (Posyandu, Pustu, Praktek Bidan, Puskesmas, Pelayanan bergerak di lokasi terpencil dan sulit akses ke fasilitas Kesehatan)

- e. Menghimbau OPD KB Kab. Pesisir Barat untuk optimalisasi peran petugas lini lapangan, kader, mitra kerja potensial termasuk babinsa dalam penggerakan calon peserta KB
- f. Menghimbau OPD KB Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat serta Organisasi profesi dalam memfasilitasi tempat pelayanan dan juga Tenaga Kesehatan pemberi Pelayanan KB (Provider)
- g. Perwakilan BKKBN membuat media KIE Kreatif atau berkolaborasi membuat media promosi KB. Dalam meningkatkan jangkauan promosi program KB dilakukan dengan menyebarkannya melalui media sosial pengelola program KB Provinsi maupun Kabupaten Pesisir Barat

Besarnya dukungan yang BKKBN berikan dalam memfasilitasi pelayanan KB di Kab/Kota membuat OPD Kab/Kota tidak merasa berjuang sendiri dalam meningkatkan jumlah peserta KB. OPD KB menjadi lebih percaya diri mampu melalui tantangan pelayanan KB dalam situasi Pandemi Covid-19, dan melihat hasil pelayanan

TMMD yang dilakukan dari tanggal 11 Mei yang awal mulanya hanya berani melakukan pelayanan di 1 desa saja, menjadi bersemangat menyelenggarakan di seluruh fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat dan pada akhir pelayanan yang selesai pada tanggal 9 Juni 2022 mampu mencapai target peserta KB sebesar 103,56%.

## PENUTUP

Kerjasama kemitraan yang baik terbukti dapat mengatasi permasalahan yang ada. Ketercapaian jumlah peserta KB di Kabupaten Pesisir Barat membuktikan bahwa selagi potensi penyelenggaraan Pelayanan KB disediakan oleh BKKBN Provinsi dan OPD KB bersedia melakukan intensifikasi pelayanan KB bergerak dengan memanfaatkan momentum serta melibatkan mitra potensial dalam promosi maupun penyediaan tenaga Kesehatan maka penguatan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut ber-KB dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, B., Ners, P., & Keperawatan, S. (2021). *FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM*. 1(3), 73–83.
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. file:///C:/Users/user/Downloads/Irwan-Buku-Etika-dan-Perilaku-Kesehatan.pdf
- Profil Kesehatan Republik Indonesia, 2020. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia, 2020* (2020 ed.).
- Rachmawati, W. C. (n.d.). *Promosi kesehatan*

dan ilmu perilaku.

- Shodiq, M. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19*. 2(2), 1–9.
- Sutanto Priyo Hastono. (n.d.). *Analisis Data Pada Bidang Kesehatan*. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/63819>
- Wardani, N. E. K., Irawati, D., & Wayanti, S. (2019). Pengaruh Konseling Terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Akseptor KB dalam Pemilihan AKDR Post Plasenta. *Pamator Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i1.5172>